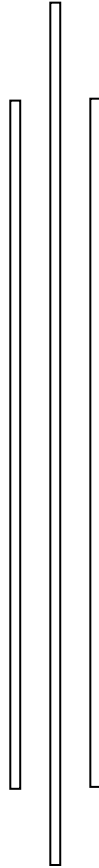


PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN



LAPORAN KEUANGAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA
TAHUN ANGGARAN 2018
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2018

DAFTAR ISI

Pernyataan Tanggung Jawab.....	
Laporan Realisasi Anggaran	
Neraca	
Laporan Operasional	
Laporan Perubahan Ekuitas	
Catatan Atas Laporan Keuangan	
- BAB I Pendahuluan	
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	
- BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Program Pencapaian Target Kinerja	
2.1 Ekonomi Makro	
2.2 Kebijakan Keuangan	
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	
- BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.....	
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	
3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan	
- BAB IV Kebijakan Akuntansi	
4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan.....	
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	

- 4.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP
Pada Pemerintah Daerah
- BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan.....
- 5.1 Rincian Dari Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan Pemerintah
Daerah
- BAB VI PENJELASAN TAMBAHAN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran; Neraca; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pesisir Selatan, 2019

Camat IV Nagari Bayang Utara



RONALD BERNANDO.S.IP

NIP. 19881026 200701 1 001

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan tahun 2018 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2018 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja.

Realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 0,- mencapai 0 % dari anggarannya.

Realisasi belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.458.268.413,-atau mencapai 97,56% dari anggarannya.

b. Laporan Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2018 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 2.161.375.444,95,-

c. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai pendapatan LO, beban, surplus/defisit.

Pendapatan LO dari kegiatan Operasional Rp 0,-, Beban Operasi - LO Rp 1.527.833.727,00,- dan surplus/defisit sebesar Rp 1.527.833.727,00,-

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai Ekuitas awal, Surplus/Defisit LO, koreksi-koreksi dan Ekuitas Akhir.

Laporan Perubahan Ekuitas akhir sebesar Rp 3.615.232.694,00

e. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam Penyajian Laporan Operasioanal, pendapatan dan beban diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
14. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan Nomor 125 Tahun 2015 tentang APBD
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 161 tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan

1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain:

- a. Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Informasi tentang kebijakan keuangan dan ekonomi makro;
- c. Informasi pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- f. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan pemerintah daerah, dalam hal ini di OPD Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan, mencakup aspek kebijakandi bidang pengeluaran, Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran antara lain untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil dan pengeluaran lainnya yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas.

2.3 Program Pencapaian Target Kinerja

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2018, OPD Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai 10 (sepuluh) program dalam urusan pelayanan umum, dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya.

Program-program APBD OPD Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Program pelayanan administrasi perkantoran ;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur ;
- c. Program Pendidikan Politik Masyarakat;
- d. Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Nagari;
- e. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
- f. Program Pematangan Otonomi Daerah;
- g. Program Administrasi Kependudukan;
- h. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
- i. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- j. Program Pembangunan Wilayah Kecamatan;

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

OPD Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2018 secara keseluruhan sebesar Rp 2.027.499.542,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp.)
1.	Belanja Tidak langsung	1.557.763.656,00
2.	Belanja Langsung	469.735.886,00
	Surplus/(Defisit)	(2.027.499.542,00)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh OPD Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 2.027.499.542,00

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2018 dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%
1	2	3	4	$5=(4/3 \times 100)$
1.	Belanja	2.027.499.542,00	1.986.032.140,00	97,95
	Belanja Tidak langsung	1.557.763.656,00	1.527.833.727,00	98,08
	Belanja Langsung	469.735.886,00	458.198.413,00	97,54
	Surplus/(Defisit)	(2.027.499.542,00)	1.986.032.140,00	97,44

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1.1. Belanja Daerah

Realisasi belanja sampai akhir tahun 2018 sebesar Rp.2.027.032.140,00 atau 97,95 persen, dengan demikian jumlah anggaran belanja yang tidak dapat diserap sebesar Rp.41.467.402,00 atau 2,05 persen yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	NAMA PRGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.557.764.106	1.527.833.727	98,08
B	BELANJA PEGAWAI	1.557.764.106	1.527.833.727	98,08
C	BELANJA LANGSUNG	469.735.886	458.268.413	97,56
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTASI PERKANTORAN		235.154.696	224.968.913	95,67
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.400.000	10.261.560	45,07
b.	Belanja air	1.800.000	1.673.500	92,97
b.	Belanja Listrik	9.600.000	8.588.060	89,46
2.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	45.750.000	45.750.000	100,00
a.	Belanja Pegawai	45.750.000	45.750.000	100,00
3.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	16.871.344	16.871.344	100,00
a.	Belanja Barang dan Jasa	16.871.344	16.871.344	100,00
4.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	3.250.000	3.250.000	100,00
a.	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000	3.250.000	100,00
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	17.505.240	17.505.240	100,00
a.	Belanja Barang dan Jasa	17.505.240	17.505.240	100,00
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.824.000	13.823.569	100,00
a.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.515.000	1.515.000	100,00
b.	Belanja cetak	8.102.569	8.102.569	100,00
c.	Belanja Penggandaan	4.206.431	4.206.000	99,99
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.454.112	5.395.000	98,92
a.	Belanja Barang dan Jasa	5.454.112	5.395.000	98,92
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	3.595.000	99,86
a.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000	3.595.000	99,86
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	13.800.000	13.800.000	100,00
a.	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000	13.800.000	100,00
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	33.150.000	24.167.200	72,90
a.	Belanja Barang dan Jasa	33.150.000	24.167.200	72,90
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	62.525.000	62.525.000	100,00
a.	Belanja Barang dan Jasa	62.525.000	62.525.000	100,00

12	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	8.025.000	8.025.000	100,00
a.	Belanja Barang dan Jasa	8.025.000	8.025.000	100,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		40.500.000	39.500.000	97,18
4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	35.500.000	34.500.000	97,18
a.	Belanja Barang dan Jasa	35.500.000	34.500.000	97,18
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5.000.000	5.000.000	100,00
a.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	5.000.000	100,00
PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT		3.610.000	3.610.000	100,00
1.	Fasilitas Penyelenggara PILWANA	3.610.000	3.610.000	100,00
a.	Belanja Barang dan Jasa	3.610.000	3.610.000	100,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAHAN KEUANGAN NAGARI		15.680.000	15.656.000	149,77
1.	Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Pemerintah Nagari	9.900.000	9.886.000	99,86
b.	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000	9.886.000	99,86
2	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Nagari	5.780.000	5.770.000	99,83
b.	Belanja Barang dan Jasa	5.780.000	5.770.000	99,83
PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN		15.350.000	15.350.000	100,00
1.	Pelaksanaan Upacara HUT RI	15.350.000	15.350.000	100,00
b.	Belanja Barang dan Jasa	15.350.000	15.350.000	100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA		15.180.000	15.180.000	100,00
1.	Pelaksanaan Festival Langkisau	15.180.000	15.180.000	100,00
a.	Belanja Barang dan Jasa	15.180.000	15.180.000	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAHAN SOSIAL		51.399.350	51.291.500	99,79
1.	Penunjang Kegiatan MTQ Kabupaten	51.399.350	51.291.500	99,79
a.	Belanja Barang dan Jasa	51.399.350	51.291.500	99,79
PROGRAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		10.830.920	10.727.000	99,04
1.	Penataan Administrasi Kependudukan	10.830.920	10.727.000	99,04
a.	Belanja Barang dan Jasa	10.830.920	10.727.000	99,04
PROGRAM PEMATANGAN OTONOMI DAERAH		19.675.000	19.675.000	100,00
1.	Pembinaan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	9.175.000	9.175.000	100,00
b.	Belanja Barang dan Jasa	9.175.000	9.175.000	100,00
2	Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	10.500.000	10.500.000	100,00
b.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000	10.500.000	100,00
PROGRAM PEMBANGUNAN WILAYAH KECAMATAN		62.355.920	62.310.000	99,93
1.	Pembinaan PKK Kecamatan	41.095.000	41.082.000	99,97
a.	Belanja Barang dan Jasa	41.095.000	41.082.000	99,97
3.	Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong	4.125.000	4.122.000	99,93
a.	Belanja Barang dan Jasa	4.125.000	4.122.000	99,93
5.	Perencanaan Pembangunan Kecamatan	11.385.000	11.375.000	99,91
b.	Belanja Barang dan Jasa	11.385.000	11.375.000	99,91
6.	Fasilitasi Masalah Trantib dan Pertanahan	1.225.000	1.225.000	100,00

a. Belanja Pegawai	1.225.000	1.225.000	100,00
6. Fasilitas Penyelenggaraan PATEN	4.525.920	4.506.000	99,56
a. Belanja Pegawai	4.525.920	4.506.000	99,56
TOTAL (BELANJA LANGSUNG + BELANJA TIDAK LANGSUNG)	2.027.499.542	1.986.032.140	97,95

3.2 Hambatan dan Kendala

Secara umum berapa hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target realisasi belanja yang tidak optimal antara lain :

- Satuan Kerja (pelaksana anggaran) kurang dapat mengimplementasikan peraturan perundangan yang tiap tahun mengalami perubahan;
- Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang teknis kegiatan seperti belum tersedianya gedung arsip, belum adanya gudang penyimpanan alat tulis kantor dan barang milik negara;
- Masih terbatasnya tenaga teknis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
- Perencanaan Kinerja dan Penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi) Dokumen Anggaran yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah Satuan-satuan Kerja Perangkat Daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

1. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

a. Pendapatan-LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam akuntansi pendapatan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas oleh entitas akuntansi/pelaporan

b. Belanja-LRA

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam akuntansi belanja yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas oleh entitas akuntansi/pelaporan.

c. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Daerah dan dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Daerah.

d. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini, tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Pengukuran/penilaian Aset adalah sebagai berikut.

1) **Persediaan**

Persediaan disajikan sebesar:

- a) **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- b) **Biaya standar** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
- c) **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

2) **Investasi**

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, investasi jangka panjang baik permanen maupun nonpermanen dicatat sebesar biaya perolehan. Untuk surat berharga tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya, yaitu sebesar harga pasar. Sedangkan Investasi jangka pendek non saham dicatat sebesar nilai nominalnya.

3) **Tanah**

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

4) **Gedungan dan Bangunan**

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak

memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan.

5) Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

6) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

7) Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

8) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- c) Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:
 - Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

e. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar saham. Arus ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

f. Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah.

g. Pendapatan LO

Pendapatan – LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.

h. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.

4.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menyusun dan menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 tahun 2016 tanggal 30 Mei 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 tahun 2017 tanggal 28 Agustus 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Terkait dengan Peraturan Bupati tersebut maka dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sudah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
a. Aset	2.161.375.444,95	2.161.375.444,95

Saldo Aset OPD KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2018 sebesar Rp 2.161.375.444,95 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
(1)	Aset Lancar	0,00	0,00
(2)	Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00

(3)	Aset Tetap	2.161.375.444,95	2.161.375.444,95
(4)	Dana Cadangan	0,00	0,00
Jumlah Aset		2.161.375.444,95	2.161.375.444,95

31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
--	--

1) Aset Lancar

0,00

0,00

Saldo Aset Lancar OPD KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2018 sebesar 0 ,00, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
(a)	Kas	0,00	0,00
(b)	Piutang Retribusi	0,00	0,00
(c)	Piutang lain-lain	0,00	0,00
(d)	Persediaan	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00

	31 Desember 2018 (Rp)		31 Desember 2017 (Rp)
(a) Kas	0,00		0,00

Saldo Kas OPD KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00 terdiri atas:

No	Uraian	Tahun 2018 (Rp.)	Tahun 2010 (Rp.)
(1)	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
(2)	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00

	31 Desember 2018 (Rp)		31 Desember 2017 (Rp)
(b) Piutang Retribusi	0,00		0,00

Saldo Piutang Retribusi OPD KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA Kabupaten Pesisir Selatan per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Jenis	Nilai (Rp)
1		0,00
Jumlah		0,00

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
(c) Piutang lain-lain	0,00	0,00

Saldo piutang lain-lain OPD KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA Kabupaten Pesisir Selatan per tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00, terdiri dari:

No	Jenis	Nilai (Rp)
1		0,00
Jumlah		0,00

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
(d) Persediaan	0,00	0,00

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang masih berada di OPD KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA Kabupaten Pesisir Selatan yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional OPD KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA Kabupaten Pesisir Selatan, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Saldo persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik per 31 Desember 2018 sebesar Rp 0 ,00, dengan rincian sebagai berikut.

NO	URAIAN	NILAI (Rp.)
(1)	Alat Tulis Kantor (ATK)	0,00
(2)	Perangko, materai, dan benda pos lainnya	0,00
(3)	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	0,00
(4)	Bahan Cetak	0,00
(5)		0,00
	Jumlah	0,00

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
2) Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00

Saldo Investasi jangka Panjang OPD KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2017 sebesar nihil.

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
3) Aset Tetap	2.161.375.444,95	2.161.375.444,95

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap OPD KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2017 dan per 31 Desember dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
(a)	Tanah	265.000.000,00	265.000.000,00
(b)	Peralatan dan Mesin	476.528.278,28	476.528.278,28
(c)	Gedung dan Bangunan	1.393.963.500,00	1.393.963.500,00
(d)	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	22.254.500,00	22.254.500,00
(e)	Aset Tetap Lainnya	3.629.166,67,00	3.629.166,67,00
(f)	Konstruksi dalam Pengerjaan		
(g)	Akumulasi Penyusutan		
Jumlah Aset		2.161.375.444,95	2.161.375.444,95

Sedangkan mutasi penambahan dalam Tahun Anggaran 2017 dan 2018 sebesar

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
(a) Tanah	265.000.000,00	265.000.000,00

Saldo Tanah OPD KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2017 sebesar Rp265.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2018		265.000.000,00	
Penambahan Aset Tetap Tanah			
	Belanja Pegawai		
	Belanja Barang dan		

	Jasa				
	Belanja Modal				
	Hibah				
	Mutasi				
	Reklasifikasi				
	Koreksi		+		
	Jumlah penambahan			0	
Pengurangan Aset Tetap Tanah					
	Penghapusan	(.....)			
	Mutasi	(.....)			
	Hibah	(.....)			
	Reklasifikasi	(.....)			
	Koreksi	(.....)	+		
	Jumlah Pengurangan			(0)	+
Saldo Akhir Per 31 Desember 2018				265.000.000,00	

Rincian perolehan aset tetap tanah dapat dilihat pada Lampiran 7 *Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2018*

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
(b) Peralatan dan Mesin	476.528.278,28	476.528.278,28

Saldo peralatan dan mesin OPD KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2018 sebesar Rp 476.528.278,28 dengan perincian sebagai berikut. Rincian dapat dilihat pada *lampiran mutasi asset tetap 2018*

Saldo Awal Per 1 Januari 2018			476.528.278,28	
Penambahan Peralatan dan Mesin				
	Belanja Pegawai			
	Belanja Barang dan Jasa			

	Belanja Modal			
	Hibah			
	Mutasi			
	Koreksi		+	
	Jumlah penambahan			
Pengurangan Peralatan dan Mesin				
	Penghapusan			
	Mutasi			
	Hibah			
	Reklasifikasi			
	Koreksi (ekstrakom)		+	
	Jumlah Pengurangan			+
Saldo Akhir Per 31 Desember 2017			476.528.278,28	

Rincian perolehan asset tetap tanah dapat dilihat pada Lampiran 8 *Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017*

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
(c) Gedung dan Bangunan	1.393.963.500,00	1.393.963.500,00

Saldo gedung dan bangunan OPD KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2018 sebesar Rp 1.393.963.500,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2018			1.393.963.500,00	
Penambahan Gedung dan Bangunan				
	Belanja Pegawai			
	Belanja Barang dan Jasa			
	Belanja Modal			

	Hibah				
	Mutasi				
	Koreksi		+		
	Jumlah penambahan				
Pengurangan Gedung dan Bangunan					
	Penghapusan				
	Mutasi				
	Hibah				
	Koreksi	(.....)	+		
	Jumlah Pengurangan				+
Saldo Akhir Per 31 Desember 2017				1.393.963.500,00	

Rincian perolehan asset tetap gedung dan bangunan dapat dilihat pada Lampiran 9 *Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018*

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
(d) Jalan, Jaringan dan Instalasi	22.254.500,00	22.254.500,00

Saldo jalan, jaringan dan instalasi OPD KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2017 sebesar Rp 22.254.500,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2018			22.254.500,00	
Penambahan Jalan, Jaringan dan Instalasi				
	Belanja Pegawai			
	Belanja Barang dan Jasa			
	Belanja Modal			
	Hibah			
	Mutasi			

	Reklasifikasi				
	Koreksi		+		
	Jumlah penambahan				
Pengurangan Jalan, Jaringan dan Instalasi					
	Penghapusan	(.....)			
	Mutasi	(.....)			
	Hibah	(.....)			
	Reklasifikasi	(.....)			
	Koreksi	(.....)	+		
	Jumlah Pengurangan			(.....)	+
Saldo Akhir Per 31 Desember 2018				22.254.500,00	

Rincian perolehan asset tetap Jalan, Jaringan dan Instalasi dapat dilihat pada Lampiran 10 *Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Instalasi per 31 Desember 2017*

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
(e) Aset Tetap Lainnya	3.629.166,67	3.629.166,67

Saldo Aset Tetap Lainnya OPD KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2018 sebesar Rp 3.629.166,67 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2018			3.629.166,67	
Penambahan Aset Tetap Lainnya				
	Belanja Pegawai			
	Belanja Barang dan Jasa			
	Belanja Modal			
	Hibah			
	Mutasi			

	Reklasifikasi			
	Koreksi		+	
	Jumlah penambahan			
Pengurangan Aset Tetap Lainnya				
	Penghapusan	(.....)		
	Mutasi	(.....)		
	Hibah	(.....)		
	Reklasifikasi	(.....)		
	Koreksi	(.....)	+	
	Jumlah Pengurangan			(.....) +
Saldo Akhir Per 31 Desember 2018				3.629.166,67

Rincian perolehan aset tetap lainnya dapat dilihat pada Lampiran 11 *Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018*

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
(f) Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00

Saldo aset tetap berupa Kontruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00.

Saldo kontruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2018 *nihil*

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
(g) Akumulasi Penyusutan	0,00	v

Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2018 sebesar Rp 0,00 dengan

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
4) Dana Cadangan	0,00	0,00

2. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
a. Pendapatan	0,00	0,00

Pendapatan meliputi semua penerimaan OPD KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA Kabupaten Pesisir Selatan dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah. Pendapatan OPD KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran dan realisasi dalam Tahun Anggaran 2018 serta realisasi Tahun Anggaran 2017, adalah *nihil*

No	Pendapatan Daerah	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2018	2017
(1)	Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00
	- Pajak			
	- Retribusi ...			
(2)	Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00

-

3. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL

31 Desember 2018
(Rp)

a. Pendapatan LO

0,00

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam TA 2018 dan sebagai berikut, adalah *nihil* sebagai berikut.

No	Pendapatan Daerah	2018 (Rp)
(1)	Pendapatan Asli Daerah	0,00
	- Pajak	
	- Retribusi ...	
(2)	Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00
Jumlah		0,00

	31 Desember 2018 (Rp)		
b. Beban	1.527.833.727,00		

Beban LO merupakan belanja atau beban yang telah sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan, dengan realisasi dalam tahun 2018, sebagai berikut.

BAB VI

PENJELASAN TAMBAHAN

OPD KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA pada penyusunan Laporan Keuangan 2017 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan Restatement Neraca Per 31 Desember 2017 (setelah Audit).
2. Perhitungan Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2017.
3. Perhitungan penyusutan per 31 Desember 2018.

Pesisir Selatan, JANUARI 2019
CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA
Kabupaten Pesisir Selatan

(**RONALD BERNANDO, S.IP**)

NIP. 19881026 200701 1 001



